



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DIGITALISASI SISTEM KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN KAWASAN ASEAN

Venti Eka Satya

Analisis Legislatif Ahli Madya
venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kepemimpinan Indonesia di tingkat global dalam Presidensi G20 Jalur Keuangan terus berlanjut melalui Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dalam jalur ekonomi khususnya pilar keuangan. Kepemimpinan Indonesia untuk mendukung ekonomi kawasan ASEAN tersebut akan menghasilkan aksi nyata dalam pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang berlangsung pada 28-31 Maret 2023 di Bali. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, para delegasi akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif untuk mewujudkan tiga *Priorities Economic Deliverables* (PEDs), salah satunya percepatan transformasi ekonomi digital inklusif dan partisipasi.

Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa kerangka integrasi digital ASEAN sangat dibutuhkan untuk mempercepat digitalisasi negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara. Untuk mencapainya, terdapat tiga kunci transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus untuk mengatasi risiko yang meliputinya, yaitu: (i) melanjutkan *Regional Payment Connectivity* yang telah disepakati oleh lima negara ASEAN dan menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya; (ii) memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto; dan (iii) mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya.

Digitalisasi dalam sistem pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, adalah (i) pengembangan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan; (ii) pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran; (iii) penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti *credit scoring*; dan (iv) penguatan literasi keuangan serta perlindungan konsumen. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Menurut Bank Dunia, saat ini terdapat 400 juta orang dari 1,4 miliar penduduk ASEAN yang tidak memiliki rekening bank. Dengan digitalisasi, kesenjangan inklusi dan daya tahan keuangan di kawasan ASEAN dapat diatasi. Selain kesenjangan gender, terdapat enam kesenjangan utama di ASEAN yang perlu diatasi untuk mencapai akses keuangan yang adil. Kesenjangan dimaksud yaitu kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, kesenjangan pendapatan, kesenjangan permintaan kredit untuk UMKM yang tidak terpenuhi, biaya pengiriman uang, kesenjangan usia, dan akses ke layanan keuangan digital. Digitalisasi layanan keuangan dapat menutupi keenam kesenjangan tersebut melalui teknologi digital, uang elektronik, pembayaran digital, memperkuat ketahanan finansial, memitigasi risiko, menurunkan biaya transaksi, serta mempersempit kesenjangan keuangan.

Menurut data Bank Dunia, pada 2021, masih ada perbedaan yang mencolok pada indeks inklusi keuangan di antara anggota negara ASEAN. Indeks inklusi terendah tercatat berada di level 33%, sedangkan level tertinggi pada kisaran 90%. Adapun rata-rata indeks inklusi

keuangan di ASEAN sebesar 41%. Berdasarkan data The Global Financial Index, Kamboja dan Laos memiliki indeks inklusi keuangan terendah, masing-masing 33,39% dan 37,32%. Sementara inklusi keuangan Filipina mencapai 51,37%. Sedangkan indeks inklusi keuangan tertinggi dimiliki oleh Malaysia, Singapura, dan Thailand, yakni 88,37%, 97,55%, dan 95,58%. Indeks inklusi keuangan Indonesia, menurut data Global Financial Index 2021 mencapai 51,76%. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2022, inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 85,1%. Capaian ini meningkat cukup tinggi dibandingkan 2019, yang hanya 76,19%. OJK menargetkan inklusi keuangan Indonesia mencapai 90% pada tahun 2024.

Masyarakat yang belum memiliki akses layanan keuangan alias eksklusi keuangan, menjadi faktor kritis bagi ekonomi di kawasan ASEAN. Eksklusi keuangan diartikan sebagai kesulitan yang dialami seseorang dalam mengakses dan/atau menggunakan layanan jasa keuangan. Pembentukan *Working Committee on Financial Inclusion* (WF-FINC), ASEAN ditujukan untuk menurunkan tingkat eksklusi keuangan dari 44% menjadi 30%. Secara rata-rata tingkat eksklusi keuangan di ASEAN saat ini sebesar 22,62%. Meski angka ini telah melampaui target di bawah 30%, namun angka ini masih dapat terus ditekan karena ASEAN sebenarnya masih memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh dan maju. Untuk dapat membangun fasilitas inklusi keuangan secara optimal, diperlukan kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai.

Atensi DPR

Digitalisasi dalam sistem pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Dengan digitalisasi, kesenjangan inklusi dan daya tahan keuangan di kawasan ASEAN dapat diatasi. Indeks inklusi keuangan Indonesia, menurut data Global Financial Index 2021 mencapai 51,76%. Menurut data OJK, pada tahun 2022, inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 85,1%, meningkat cukup tinggi dibandingkan 2019 yang hanya 76,19%. OJK menargetkan inklusi keuangan Indonesia mencapai 90% pada 2024. DPR RI dalam hal ini Komisi XI perlu memberikan perhatian terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terutama di daerah terpencil. Hal ini sangat dibutuhkan untuk pemerataan akses keuangan dan mengatasi berbagai kesenjangan aksesibilitas keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun angka inklusi keuangan Indonesia cukup tinggi, namun masih tertinggal dibandingkan negara tetangga Malaysia, Thailand, dan Singapura. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengembangkan fasilitas yang dapat mendukung inklusi keuangan melalui pembangunan sistem keuangan digital atau *financial technology* dan infrastruktur yang memadai.

Sumber

antaranews.com, 28 Maret 2023;
cnbcindonesia.com, 29 Maret 2023;
cnnindonesia.com, 28 Maret 2023;
ekonomi.republika.co.id, 28 Maret 2023;
lbi.go.id, 28 Maret 2023; dan
ojk.go.id, 22 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.